



## Implementasi Kebijakan Anti-Bullying di Sekolah Dasar Kota Metro: Upaya Menciptakan Lingkungan Aman bagi Siswa

Fadri Ari Sandi<sup>1)</sup>, Helni Sadid Parassa<sup>2)</sup>

Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

[fadri.ari@ecampus.ut.ac.id](mailto:fadri.ari@ecampus.ut.ac.id)<sup>1)</sup>  
[helni.sadid@ecampus.ut.ac.id](mailto:helni.sadid@ecampus.ut.ac.id)<sup>2)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan anti-bullying di Sekolah Dasar Kota Metro serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan anti-bullying di Kota Metro telah berjalan secara terstruktur melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tingkat kota hingga satuan pendidikan, didukung oleh regulasi, sosialisasi yang intensif, serta monitoring dan evaluasi berkala. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif melalui penguatan karakter, integrasi nilai anti-kekerasan dalam pembelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pihak turut memperkuat efektivitas implementasi kebijakan. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pengawasan, pengaruh media sosial, serta rendahnya keterlibatan sebagian orang tua. Data juga menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman siswa belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan kasus perundungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek sumber daya, sistem evaluasi, literasi digital, serta kolaborasi multipihak agar implementasi kebijakan anti-bullying dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Sebagai rekomendasi praktis, diperlukan penambahan tenaga khusus di tingkat dinas, penguatan sistem monitoring berbasis digital, peningkatan literasi digital bagi siswa dan orang tua, serta optimalisasi peran sekolah dan komunitas melalui program kolaboratif yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Anti-Bullying, Implementasi Kebijakan, Kota Metro, Sekolah Dasar

### Abstract

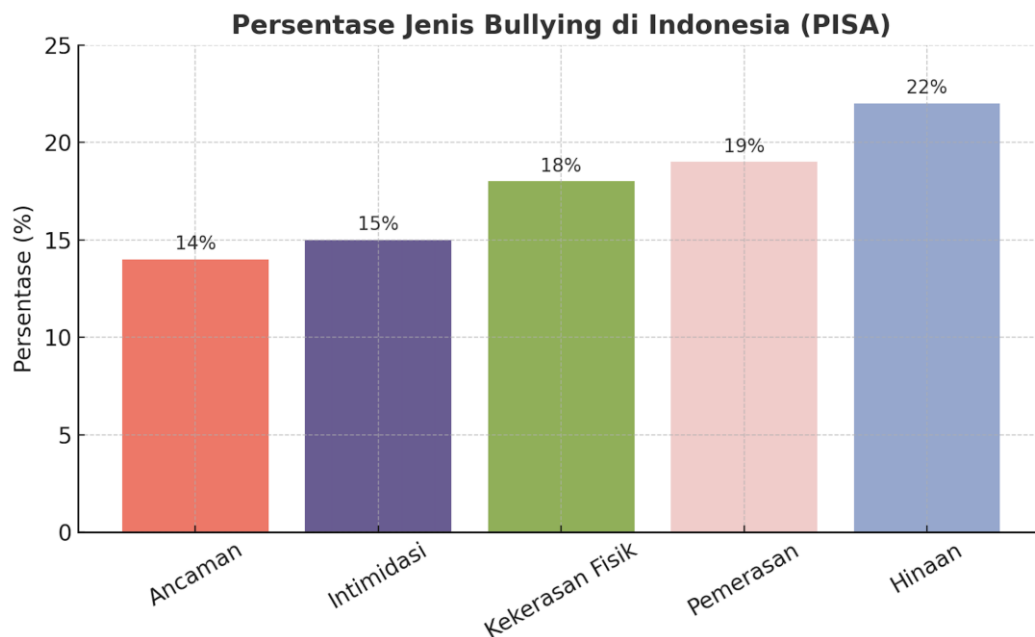
*This study aims to analyze the implementation of anti-bullying policies in elementary schools in Metro City and identify supporting factors and obstacles in their implementation. This study used a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation, and analyzed descriptively with reference to policy implementation theory. The results show that the implementation of anti-bullying policies in Metro City has been carried out in a structured manner through the establishment of Violence Prevention and Handling Teams (TPPK) at the city level down to the educational unit level, supported by regulations, intensive socialization, and regular monitoring and evaluation. This policy not only focuses on case handling but also prioritizes a preventive approach through character building, integration of anti-violence values into learning, and extracurricular activities. In addition, cross-sector collaboration with various parties has strengthened the effectiveness of policy implementation. However, policy implementation still faces obstacles, such as limited human resources, suboptimal supervision, the influence of social media, and low involvement of some parents. Data also shows that increased student understanding has not been fully accompanied by a decrease in bullying cases.*

Therefore, strengthening resources, evaluation systems, digital literacy, and multi-stakeholder collaboration are needed to ensure more effective and sustainable implementation of anti-bullying policies, creating a safe and conducive school environment. As practical recommendations, it is necessary to add specialized personnel at the service level, strengthen digital-based monitoring systems, improve digital literacy for students and parents, and optimize the role of schools and communities through sustainable collaborative programs.

**Keywords:** Anti-Bullying, Policy Implementation, Metro City, Elementary School

## PENDAHULUAN

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius di bidang pendidikan, salah satunya adalah rendahnya moral dan etika di kalangan pelajar. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya tindakan kekerasan di lingkungan sekolah, yang sering disebut sebagai bullying (Darmawan, 2017). Bullying sendiri merujuk pada perilaku agresif yang biasanya terjadi pada anak usia sekolah, di mana terdapat ketidakseimbangan kekuasaan yang nyata antara pelaku dan korban. Tindakan ini mencerminkan perilaku yang bertujuan untuk menyakiti atau menindas individu yang dianggap lebih lemah, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik (Masdin, 2013). Dampak bullying dapat berupa gangguan emosional, penurunan prestasi akademik, bahkan dalam kasus yang ekstrem dapat menyebabkan depresi dan masalah kesehatan mental lainnya (Olweus, 1993; Rigby, 2002). Indonesia menempati peringkat kelima tertinggi dalam kasus bullying di dunia berdasarkan data dari 78 negara, menurut survei yang dilakukan oleh *Programme for International Student Assessment (PISA)*. Berdasarkan studi tersebut, sekitar 42% pelajar Indonesia yang berusia 15 tahun pernah mengalami tindak kekerasan atau perundungan dalam satu bulan terakhir. Secara rinci, 14% di antaranya menghadapi ancaman, 15% mengalami intimidasi, 18% menjadi korban kekerasan fisik seperti pemukulan dan dorongan, 19% terlibat dalam kasus pemerasan, serta 22% siswa mengalami perundungan berupa hinaan (Yusnata, 2023).



Sumber : PISA (2022)

Pada awal tahun 2024, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 141 kasus kekerasan anak (KPAI, 2024). Sementara itu, data dari SIMFONI-PPA menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar, yakni mencapai 10.592 kasus sepanjang tahun 2024 (SIMFONI-



PPA, 2024). Di lingkungan pendidikan, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan terdapat 293 kasus kekerasan di sekolah (JPPI, 2024). Selain itu, GoodStats mencatat total kasus kekerasan anak di Indonesia mencapai 15.267 kasus pada tahun yang sama (GoodStats, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak.

Bullying di lingkungan sekolah merupakan permasalahan serius yang dapat mengganggu perkembangan psikologis, sosial, dan akademik siswa. Tindakan bullying, baik secara fisik, verbal, maupun digital, dapat menyebabkan trauma mendalam bagi korban dan menciptakan atmosfer sekolah yang tidak aman. Oleh karena itu, implementasi kebijakan anti-bullying di sekolah dasar menjadi krusial untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi siswa. Pendidikan di sekolah dasar memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan perkembangan sosial emosional siswa. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif sangatlah penting untuk menunjang perkembangan tersebut. Dalam upaya mengatasi permasalahan bullying, banyak daerah dan sekolah yang mulai menerapkan kebijakan anti-bullying sebagai langkah preventif untuk mengurangi terjadinya bullying dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi siswa. Kebijakan anti-bullying diharapkan tidak hanya mencegah peristiwa bullying, tetapi juga mengubah perilaku dan pola pikir siswa, guru, dan pihak terkait lainnya mengenai pentingnya menciptakan ruang belajar yang aman dan inklusif (Smith & Sharp, 1994).

Di Indonesia, implementasi kebijakan anti-bullying di sekolah-sekolah, termasuk di tingkat sekolah dasar, semakin menjadi fokus utama dalam sistem pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung pencegahan bullying, salah satunya adalah melalui Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anti-bullying yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif, mencakup partisipasi aktif dari guru, siswa, orang tua, dan komunitas sekolah secara keseluruhan. Menurut Amanda (2021), pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai anti-bullying perlu diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dasar untuk membentuk perilaku positif siswa. Selain itu, pelatihan bagi guru dalam mengenali dan menangani kasus bullying sangat penting untuk memastikan respons yang tepat terhadap insiden yang terjadi di sekolah (Fadil, 2023). Menurut Smith et al. (2020), program anti-bullying yang berhasil biasanya melibatkan edukasi tentang bullying, pengembangan keterampilan sosial siswa, serta penegakan aturan yang konsisten terhadap perilaku bullying. Selain itu, Olweus (2013) menekankan pentingnya pendekatan sistemik yang mencakup intervensi di tingkat individu, kelas, dan sekolah secara keseluruhan.

Namun, meskipun kebijakan anti-bullying sudah diterapkan di banyak sekolah, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian di SD N 2 Sambongsari menunjukkan bahwa meskipun kebijakan anti-bullying telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman siswa tentang kebijakan tersebut dan keterbatasan sumber daya untuk mendukung program anti-bullying (Maharani et al., 2024). Hal ini sejalan dengan temuan (Rigby & Smith, 2011) yang menekankan pentingnya evaluasi dan adaptasi kebijakan sesuai dengan konteks lokal untuk mencapai hasil yang optimal. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan konteks lokal masing-masing sekolah. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan ini antara lain adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang bullying, minimnya pelatihan bagi guru dalam menangani kasus bullying, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk mendukung program-program pencegahan bullying (Swearer et al., 2010). Selain itu, budaya sekolah yang belum sepenuhnya mendukung upaya menciptakan lingkungan yang aman, serta



keterlibatan orang tua yang masih terbatas, juga dapat menjadi hambatan dalam keberhasilan kebijakan anti-bullying.

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan anti-bullying di tingkat sekolah dasar di Kota Metro, dengan tujuan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan dan mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Kota Metro dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang unik, baik dari sisi struktur pendidikan maupun keragaman sosial yang berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan anti-bullying. Selain itu, Kota Metro juga menunjukkan keunggulan komparatif melalui berbagai inovasi, seperti penerapan sistem pelaporan digital, penguatan struktur Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang partisipatif, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih operasional dibandingkan dengan daerah lain. Kondisi ini menjadikan implementasi kebijakan di Kota Metro tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga lebih implementatif dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi berbasis data yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pihak sekolah dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan anti-bullying, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan kondusif bagi perkembangan peserta didik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Dinas Pendidikan Kota Metro sebagai pihak pembuat kebijakan, serta tiga sekolah dasar yang telah mengimplementasikan program anti-bullying. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali dan memahami makna dari fenomena sosial atau kemanusiaan berdasarkan perspektif para informan (Creswell, 2014). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, yang mencakup data primer dan sekunder. Selanjutnya, analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang bertujuan untuk menginterpretasikan dan menemukan makna dari fenomena sosial yang diteliti berdasarkan sudut pandang informan (Creswell, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Metro yang terletak di Provinsi Lampung dikenal sebagai kota pendidikan karena memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan jumlah sekolah dasar yang cukup besar, kota ini menjadi wilayah strategis dalam penerapan berbagai kebijakan pendidikan, termasuk kebijakan anti-bullying. Kebijakan ini menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Metro sebagai bentuk respons terhadap pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah. Sejalan dengan visi pembangunan daerah, yaitu terwujudnya Kota Metro yang berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya, implementasi kebijakan anti-bullying diarahkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman serta mendukung pembentukan karakter peserta didik sejak dini. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya konkret untuk mengimplementasikan kebijakan anti-bullying. Salah satu langkah utama adalah pembentukan satuan tugas (satgas) atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tingkat kota hingga satuan pendidikan. Kebijakan ini juga diperkuat melalui surat edaran Kepala Dinas Pendidikan sebagai pedoman operasional bagi sekolah dalam menjalankan program pencegahan dan penanganan kekerasan. Sekolah dasar diposisikan sebagai titik awal yang strategis dalam menanamkan nilai-nilai moral dan membangun budaya anti-kekerasan, mengingat pada tahap ini karakter siswa mulai terbentuk secara fundamental.

Secara konseptual, bullying didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti atau menimbulkan ketidaknyamanan pada korban, yang umumnya melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan (Olweus, 1993). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis siswa, tetapi juga berpengaruh terhadap prestasi akademik dan hubungan sosial mereka. Penelitian Pontzer et al. (2023) menunjukkan bahwa bullying memiliki hubungan signifikan dengan menurunnya kesejahteraan psikologis siswa. Di Indonesia,

Saputra et al. (2022) menegaskan bahwa tingginya kasus bullying di sekolah dasar sering kali disebabkan oleh lemahnya pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah. Oleh karena itu, kebijakan anti-bullying dirancang tidak hanya untuk menangani kasus yang terjadi, tetapi juga untuk mencegah munculnya perilaku perundungan sejak awal. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti komitmen kepala sekolah, kompetensi dan pelatihan guru, serta keterlibatan aktif siswa dan orang tua (Lee & Hong, 2023). Di tingkat nasional, kebijakan ini diperkuat melalui Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan program anti-kekerasan di sekolah.

### Struktur dan Koordinasi Implementasi Kebijakan Anti-Bullying

Implementasi kebijakan anti-bullying di Sekolah Dasar Kota Metro telah dilaksanakan melalui mekanisme kelembagaan yang terstruktur dan sistematis, baik di tingkat Dinas Pendidikan maupun satuan pendidikan. Secara kelembagaan, Dinas Pendidikan mendorong pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan. Proses ini diawali dengan rapat persiapan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan pada jenjang SD yang dilaksanakan pada Kamis, 1 Agustus 2024. Dari rapat tersebut dihasilkan beberapa langkah strategis, yaitu: pertama, penyusunan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan; kedua, pelaksanaan sosialisasi terkait pembentukan dan peran tim tersebut; ketiga, sosialisasi difokuskan kepada kepala sekolah dan komite sebagai perwakilan utama di tingkat sekolah; dan keempat, setelah sosialisasi dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi yang dijadwalkan secara berkala sesuai kebutuhan dan perkembangan di lapangan. Alur ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap, dimulai dari perencanaan, pembentukan kelembagaan, sosialisasi, hingga evaluasi berkelanjutan. kegiatan sosialisasi yang sangat masif yang dihadiri seluruh pihak.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi  
Sumber : Dokumentasi Disdik Kota Metro, 2025

Kegiatan sosialisasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan (TPPKS) jenjang SD dan SMP di Kota Metro tahun 2025 merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memperkuat implementasi kebijakan anti-bullying di lingkungan sekolah. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, guru, serta unsur terkait lainnya, dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran, fungsi, dan mekanisme kerja TPPKS. Melalui sosialisasi ini, peserta dibekali pengetahuan terkait prosedur penanganan kasus, pentingnya pelaporan, serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan di satuan pendidikan. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai ruang koordinasi awal untuk menyamakan persepsi antar pelaksana kebijakan agar implementasi di lapangan berjalan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008), kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari proses transformasi kebijakan dari bentuk keputusan menjadi tindakan nyata. Implementasi tidak hanya berhenti pada perumusan kebijakan, tetapi juga mencakup langkah-langkah operasional yang dilakukan secara sistematis agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Dalam konteks ini, sosialisasi menjadi tahap awal yang penting untuk memastikan bahwa seluruh pelaksana memahami arah kebijakan dan mampu menjalankannya secara efektif. Secara implementatif, kebijakan anti-bullying di Kota Metro dijalankan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kota hingga ke satuan pendidikan. Di tingkat kota, Dinas Pendidikan telah membentuk tim khusus yang kemudian diturunkan ke setiap sekolah untuk membentuk tim serupa. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara: *“Jadi begini, di Kota Metro itu kami kondusif, dari kota sudah dibuat tim, kemudian di sekolah juga harus membuat tim terkait anti-bullying. Setiap semester dikumpulkan di kota untuk pelaporan dan evaluasi... bahkan ada pembinaan dari kepolisian untuk pencegahan”* (Wawancara, 26 Juni 2025). Pernyataan ini menunjukkan adanya alur implementasi yang jelas, di mana kebijakan diterjemahkan ke dalam struktur kelembagaan di setiap level.

Lebih lanjut, keberadaan TPPK di setiap sekolah juga menegaskan bahwa kebijakan telah dioperasionalkan hingga tingkat pelaksana. Hal ini sebagaimana disampaikan: *“Setiap sekolah sudah membentuk TPPK yang melibatkan guru, kepala sekolah, dan komite untuk menangani kasus kekerasan”*. Selain pembentukan tim, implementasi kebijakan juga diperkuat melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap semester. Sebagaimana diungkapkan oleh informan: *“Kami melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester untuk melihat perkembangan penanganan kasus di sekolah”* (Wawancara, 26 Juni 2025). Dengan demikian, alur implementasi kebijakan dapat dipahami secara sistematis, dimulai dari pembentukan tim, pelaksanaan sosialisasi, hingga evaluasi berkala. Di sisi lain, upaya penguatan implementasi juga dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas, baik bagi tenaga pendidik maupun peserta didik. Hal ini tercermin dalam pernyataan: *“Setiap ada pertemuan kepala dinas atau pembinaan dari tendik sendiri... selalu diingatkan untuk adaptif. Bahkan di Kota Metro ada POKJA inklusi... untuk menyamakan persepsi guru-guru dan tim terkait”* (Wawancara, 25 Juni 2025). Selain itu, terdapat pula keterlibatan siswa melalui pembentukan kelompok atau semacam POKJA di tingkat sekolah, yang berperan dalam mendukung upaya pencegahan bullying. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen di lingkungan pendidikan.

Secara keseluruhan, alur implementasi kebijakan anti-bullying di Kota Metro dapat dipahami sebagai proses yang terstruktur dan berkelanjutan. Dimulai dari perumusan kebijakan oleh dinas, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, pembentukan tim di setiap sekolah, pelaksanaan program pencegahan dan penanganan, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini juga ditegaskan dalam pernyataan singkat informan: *“Upaya dinas tadi mengeluarkan kebijakan, terus ada kegiatan sosialisasi, dikumpulkan”* (Wawancara, 26 Juni 2025). Dengan alur yang sistematis tersebut, implementasi kebijakan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011), kegiatan sosialisasi ini menunjukkan peran penting aspek komunikasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif ditandai dengan penyampaian informasi kebijakan secara jelas, konsisten, dan menjangkau seluruh pelaksana kebijakan. Dalam konteks ini, sosialisasi menjadi instrumen utama untuk mengurangi distorsi informasi dan memastikan bahwa setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, kegiatan ini juga berkaitan dengan aspek sumber daya, karena melalui sosialisasi, kapasitas pengetahuan dan pemahaman pelaksana meningkat, sehingga mereka lebih siap dalam menjalankan kebijakan. Dari sisi disposisi, keterlibatan aktif peserta dalam kegiatan ini menunjukkan adanya komitmen dan sikap positif terhadap implementasi kebijakan anti-bullying. Sementara itu, dari

aspek struktur birokrasi, sosialisasi ini memperkuat koordinasi antar lembaga serta memperjelas alur kerja dan prosedur yang harus dijalankan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga strategis dalam memastikan kebijakan anti-bullying dapat diimplementasikan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan di satuan pendidikan.

### **Efektivitas Komunikasi dan Sosialisasi Kebijakan**

Dari sisi komunikasi, proses sosialisasi kebijakan anti-bullying di Kota Metro dilaksanakan secara berulang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari internal sekolah maupun pihak eksternal. Sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui forum formal seperti rapat kepala sekolah, tetapi juga melibatkan orang tua melalui komite sekolah. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh informan: *“Sosialisasi dilakukan melalui rapat kepala sekolah dan juga melibatkan orang tua melalui komite sekolah.”* Pola komunikasi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi kebijakan tidak berhenti pada level pelaksana, tetapi juga menjangkau kelompok sasaran secara lebih luas, sehingga proses transmisi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan penelitian Farrington dan Ttofi (2023) yang menunjukkan bahwa implementasi program anti-bullying yang dikomunikasikan secara konsisten dan melibatkan berbagai pihak mampu menurunkan tingkat perundungan secara signifikan.

Secara lebih luas, efektivitas komunikasi dalam kebijakan anti-bullying juga ditegaskan dalam studi Gaffney et al. (2019) yang menemukan bahwa keberhasilan program pencegahan bullying sangat dipengaruhi oleh kualitas diseminasi informasi dan keterlibatan seluruh komunitas sekolah. Komunikasi yang dilakukan secara sistematis dan berulang memungkinkan terbangunnya pemahaman bersama, yang pada akhirnya memperkuat internalisasi nilai-nilai anti-kekerasan dalam budaya sekolah. Dengan demikian, pola komunikasi yang diterapkan di Kota Metro menunjukkan kesesuaian dengan praktik terbaik (*best practices*) dalam implementasi kebijakan berbasis sekolah.

Penguatan aspek komunikasi ini juga didukung oleh landasan regulatif, yaitu Keputusan Wali Kota Metro Nomor: 299/KPTS/D-01/2024 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Dalam regulasi tersebut, TPPK memiliki peran yang komprehensif, mulai dari fungsi preventif hingga kuratif. Tugas-tugas tersebut mencakup penyusunan rekomendasi program pencegahan, pelaksanaan sosialisasi, penerimaan dan penanganan laporan kasus, hingga pendampingan korban dan pelaporan kepada pemerintah daerah. Kejelasan struktur dan pembagian peran ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan di Kota Metro tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam mekanisme kerja yang sistematis.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini sejalan dengan model yang dikemukakan oleh Edwards III yang menempatkan komunikasi sebagai salah satu variabel kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Edwards menekankan bahwa kebijakan yang dikomunikasikan secara jelas, konsisten, dan berulang akan lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh pelaksana di lapangan. Hal ini diperkuat oleh temuan Fixsen et al. (2005) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program sosial sangat ditentukan oleh kejelasan komunikasi serta dukungan struktur organisasi yang memadai.

Lebih lanjut, pentingnya komunikasi yang efektif juga tercermin dari penegasan informan yang menyatakan bahwa sekolah tidak boleh bersikap pasif dalam menghadapi kasus kekerasan. Diperlukan mekanisme penanganan yang jelas, jalur komunikasi yang terbuka, serta kerja sama lintas sektor yang melibatkan sekolah, orang tua, masyarakat, hingga aparat berwenang. Pendekatan ini sejalan dengan hasil penelitian Cross et al. (2011) yang menegaskan bahwa intervensi anti-bullying yang melibatkan kolaborasi multipihak, termasuk keluarga dan komunitas, terbukti lebih efektif dalam menurunkan prevalensi bullying dibandingkan pendekatan yang hanya berbasis sekolah.

Selain itu, penelitian oleh UNESCO (2020) juga menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dalam pencegahan kekerasan di sekolah, yang melibatkan berbagai aktor sosial, mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan inklusif. Keterlibatan orang tua,

tokoh masyarakat, dan teman sebaya berperan penting dalam memperkuat sistem pengawasan sosial serta membangun norma kolektif yang menolak segala bentuk kekerasan. Dalam konteks Kota Metro, keterlibatan berbagai pihak dalam proses komunikasi kebijakan menunjukkan adanya upaya membangun ekosistem pendidikan yang responsif dan partisipatif.

Secara keseluruhan, alur komunikasi kebijakan di Kota Metro dapat dipahami sebagai proses yang terintegrasi, dimulai dari sosialisasi kebijakan, penguatan melalui regulasi, hingga implementasi melalui kolaborasi multipihak. Pola ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen koordinasi, integrasi, dan penguatan komitmen bersama. Dengan demikian, komunikasi kebijakan yang efektif menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan anti-bullying serta dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif bagi peserta didik.

### **Pendekatan Preventif dan Penguatan Karakter dalam Implementasi Kebijakan Anti-Bullying**

Dari sisi substansi, implementasi kebijakan anti-bullying di Kota Metro tidak hanya berfokus pada penanganan kasus yang telah terjadi (kuratif), tetapi lebih diarahkan pada upaya pencegahan (preventif) melalui pendekatan yang bersifat holistik. Kebijakan ini dipahami sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta mendukung perkembangan karakter siswa secara menyeluruh. Hal ini sebagaimana tercermin dalam hasil wawancara: *“Program ini tidak hanya soal bullying, tetapi juga membangun karakter dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman”*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan anti-bullying tidak dipandang sebagai program yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembentukan budaya sekolah yang positif.

Dalam praktiknya, upaya preventif dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai anti-kekerasan ke dalam proses pembelajaran dan aktivitas sehari-hari siswa. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembina karakter yang menanamkan nilai-nilai moral dalam interaksi sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan: *“Kami menanamkan nilai akhlak mulia dalam kegiatan sehari-hari siswa agar mereka saling menghargai”*. Dengan demikian, proses internalisasi nilai dilakukan secara berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu membentuk perilaku siswa yang lebih empatik dan menghargai sesama.

Selain itu, strategi pencegahan juga dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan siswa. Kegiatan ini menjadi ruang alternatif bagi siswa untuk menyalurkan energi dan minat mereka secara positif, sekaligus membangun kerja sama dan interaksi sosial yang sehat. Sebagaimana diungkapkan oleh informan: *“Kegiatan ekstrakurikuler menjadi salah satu cara untuk mengurangi potensi konflik antar siswa”*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan bullying tidak hanya dilakukan melalui aturan formal, tetapi juga melalui kegiatan yang mendorong interaksi sosial yang konstruktif.

Dari aspek inovasi, yang menjadi pembeda utama adalah penerapan sistem pelaporan berbasis digital melalui penggunaan barcode yang dapat diakses oleh masyarakat. Sistem ini memungkinkan peserta didik maupun masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan secara langsung dan terhubung dengan dinas pendidikan apabila penanganan di tingkat sekolah tidak berjalan optimal (YAKUSA News, 2024). Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi dalam mekanisme pengaduan dari yang semula bersifat manual menjadi lebih transparan dan responsif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Chen et al. (2023) yang menyatakan bahwa integrasi teknologi dalam kebijakan anti-bullying dapat meningkatkan efektivitas pelaporan dan mempercepat respons terhadap kasus kekerasan di sekolah.

Gambar 2. Scan Barcode Pelayanan Pengaduan



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2025

Jika dianalisis dalam kerangka teori implementasi kebijakan, kondisi ini mencerminkan adanya disposisi atau komitmen pelaksana yang selaras dengan tujuan kebijakan. Para pelaksana di tingkat sekolah tidak hanya menjalankan kebijakan secara administratif, tetapi juga menunjukkan kesungguhan dalam menginternalisasikan nilai-nilai kebijakan ke dalam praktik pendidikan sehari-hari. Hal ini menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Temuan ini juga sejalan dengan studi Setiawan (2022) yang menyatakan bahwa sekolah dengan kebijakan anti-bullying yang kuat cenderung memiliki lingkungan belajar yang lebih positif, di mana siswa merasa aman dan dihargai. Namun demikian, penelitian Surya et al. (2023) mengingatkan bahwa tanpa evaluasi dan penyesuaian yang dilakukan secara rutin, kebijakan anti-bullying berpotensi menjadi sekadar formalitas tanpa dampak yang signifikan. Oleh karena itu, meskipun pendekatan preventif yang diterapkan di Kota Metro sudah menunjukkan arah yang positif, tetap diperlukan upaya evaluasi dan penguatan secara berkelanjutan agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata dalam menekan kasus bullying di sekolah.

### **Kolaborasi Lintas Sektor dan Dukungan Stakeholder**

Implementasi kebijakan anti-bullying di Kota Metro diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak di luar lingkungan sekolah. Kolaborasi ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan, khususnya pada aspek edukasi dan pencegahan. Pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan peran sekolah, tetapi juga menggandeng lembaga perlindungan anak, aparat kepolisian, perguruan tinggi, serta orang tua dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa.

Salah satu pihak yang terlibat adalah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kota Metro, yang memiliki peran strategis dalam upaya perlindungan anak. LPAI menjalankan program preventif melalui kegiatan sosialisasi anti-bullying kepada pelajar sebagai upaya menekan angka perundungan sejak dini. Selain itu, Polres Metro Polda Lampung juga berkontribusi melalui program *Police Goes to School*, yaitu kegiatan pembinaan langsung kepada siswa di sekolah. Dalam program ini, siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi aturan, nilai-nilai Pancasila, bahaya kenakalan remaja, bullying, serta penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya siswa, materi juga disampaikan kepada guru agar dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Program ini sekaligus bertujuan membangun hubungan yang baik antara kepolisian dan pelajar sejak dini, sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Selain itu, Universitas Lampung (UNILA) turut berperan sebagai mitra akademik dalam mendukung implementasi kebijakan anti-bullying di Kota Metro. Keterlibatan ini diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sosialisasi, serta pendampingan kepada sekolah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Peran perguruan tinggi ini penting dalam memberikan penguatan berbasis keilmuan serta meningkatkan kapasitas pemahaman para pelaksana kebijakan di lapangan.

Kolaborasi lintas sektor ini juga tercermin dalam hasil wawancara, di mana informan menyatakan: *"Kami bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga lain untuk memberikan edukasi kepada siswa"*. Selain itu, keterlibatan orang tua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penanganan kasus, sebagaimana diungkapkan: *"Setiap ada kasus, kami selalu melibatkan orang tua untuk mencari solusi bersama"*. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan anti-bullying tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Fezal selaku kabid dikdas menegaskan *"Semua tindak kekerasan yang lingkupnya publik ya atau semua masalah kekerasan yang tidak selesai di tingkat sekolah maka akan dibantu oleh tim tingkat daerah. Timnya kita melibatkan semua, LPAI, Kapolres, narasumber selaku tim itu masuk semua. Kami juga sudah mensosialisasikan kepada murid-murid jika melihat suatu tindakan kekerasan untuk segera melapor kepada guru atau kepada orang tua di sekitarnya"* (<https://www.a1bos.com/>)

Di sisi lain, beberapa sekolah juga melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung pengawasan, seperti pemasangan CCTV di lingkungan sekolah. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara: *"Sekolah memasang CCTV untuk memantau aktivitas siswa dan mencegah kejadian kekerasan"*. Inovasi ini menunjukkan adanya upaya adaptif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna memperkuat implementasi kebijakan.

Jika dikaitkan dengan kajian teoritis, temuan ini sejalan dengan studi Salmivalli (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan anti-bullying sangat dipengaruhi oleh keterlibatan komunitas sekolah, pelatihan bagi guru, serta adanya prosedur yang jelas. Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor yang dilakukan di Kota Metro menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karena mampu memperkuat aspek edukasi, pencegahan, serta penanganan kasus secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

### **Kendala Implementasi dan Tantangan Eksternal Kebijakan Anti-Bullying**

Meskipun implementasi kebijakan anti-bullying di Kota Metro telah berjalan, hasil penelitian menunjukkan masih adanya sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya di tingkat dinas, yang belum memiliki tenaga khusus untuk menangani program secara fokus. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan: *"Belum ada tenaga khusus yang fokus menangani program anti-bullying di dinas"*. Keterbatasan ini berdampak pada belum optimalnya fungsi pengawasan, pendampingan, dan pembinaan terhadap sekolah-sekolah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati et al. (2023) yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan di sekolah dasar sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan lemahnya sistem monitoring.

Selain faktor internal, tantangan juga datang dari faktor eksternal, terutama pengaruh lingkungan sosial dan penggunaan media sosial oleh siswa. Informan mengungkapkan bahwa *"Banyak konflik siswa berawal dari media sosial yang kemudian terbawa ke sekolah"*. Hal ini menunjukkan bahwa praktik bullying tidak lagi terbatas pada interaksi langsung di lingkungan sekolah, tetapi juga berkembang di ruang digital yang sulit dikontrol oleh pihak sekolah. Di sisi lain, kurangnya keterlibatan orang tua dalam mengawasi perilaku anak juga menjadi kendala. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara: *"Masih ada orang tua yang kurang peduli terhadap perilaku anak di luar sekolah"*. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sekolah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dari sisi efektivitas, implementasi kebijakan anti-bullying di Kota Metro dapat dikatakan cukup berjalan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar sekolah mampu menangani kasus bullying secara internal dengan pendekatan persuasif dan edukatif. Hal ini tercermin dari pernyataan informan: *“Sebagian besar kasus dapat diselesaikan di tingkat sekolah tanpa harus dilaporkan ke dinas”*. Namun demikian, kasus-kasus ringan seperti ejekan, perundungan verbal, dan konflik antar siswa masih sering terjadi, terutama pada jenjang kelas rendah. Sebagaimana diungkapkan: *“Kasus seperti ejekan atau konflik kecil antar siswa masih sering terjadi, terutama di kelas rendah”*. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku siswa tidak dapat dicapai secara instan, melainkan memerlukan proses pembinaan yang berkelanjutan.

Tabel 1.  
Hasil Rapor Pendidikan di 3 kategori sekolah Tahun 2023-2025

Kategori Sekolah	Indikator	Tahun		
		2023	2024	2025
1	<b>Pemahaman dan sikap terhadap perundungan</b> <i>Nilai rerata terkait pemahaman dan sikap guru terhadap segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu/sekelompok orang yang lebih "kuat" di satuan pendidikan.</i>	Naik 8,57%	Naik 4,21	Naik 13,82
	<b>Pengalaman perundungan peserta didik</b> <i>Persentase peserta didik yang aman terhadap perundungan/bullying dari guru atau sesama peserta didik di satuan pendidikan.</i>	Naik 38,10%	Turun 33,82	Naik 13,82
2	<b>Pemahaman dan sikap terhadap perundungan</b> <i>Nilai rerata terkait pemahaman dan sikap guru terhadap segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu/sekelompok orang yang lebih "kuat" di satuan pendidikan.</i>	Turun 22,88%	Naik 3,55	Naik 1,39
	<b>Pengalaman perundungan peserta didik</b> <i>Persentase peserta didik yang aman terhadap perundungan/bullying dari guru atau sesama peserta didik di satuan pendidikan.</i>	Turun 19,11%	Naik 8,99	Turun 19,15
3	<b>Pemahaman dan sikap terhadap perundungan</b> <i>Nilai rerata terkait pemahaman dan sikap guru terhadap segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu/sekelompok orang yang lebih "kuat" di satuan pendidikan.</i>	Turun 3,15%	Naik 7,75	Turun 2,95
	<b>Pengalaman perundungan peserta didik</b> <i>Persentase peserta didik yang aman terhadap perundungan/bullying dari guru atau sesama peserta didik di satuan pendidikan.</i>	Turun 42,56%	Naik 1,24	Naik 27,09

Sumber : Analisis data, 2025

Hasil analisis rapor pendidikan pada tiga kategori sekolah di Kota Metro menunjukkan adanya variasi capaian pada dua indikator utama, yaitu pemahaman dan sikap terhadap

perundungan oleh guru serta pengalaman perundungan peserta didik. Variasi ini mencerminkan tingkat implementasi kebijakan anti-bullying yang belum sepenuhnya merata antar satuan pendidikan.

Pada kategori sekolah 1, terlihat tren peningkatan yang relatif konsisten pada indikator pemahaman dan sikap guru terhadap perundungan dari tahun 2023 hingga 2025. Kondisi ini diikuti dengan perbaikan pada indikator pengalaman perundungan peserta didik, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada tahun 2024. Pola tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas guru dalam memahami dan merespons perundungan berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan belajar yang lebih aman. Temuan ini sejalan dengan pendapat Olweus (2013) yang menekankan bahwa kompetensi guru dalam mengenali dan menangani bullying merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program pencegahan perundungan di sekolah. Selain itu, Smith dan Sharp (1994) juga menyatakan bahwa intervensi berbasis sekolah yang efektif memerlukan keterlibatan aktif pendidik dalam membangun budaya anti-kekerasan.

Berbeda dengan kategori 1, kategori sekolah 2 menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. Penurunan signifikan pada indikator pemahaman guru di tahun 2023, yang kemudian diikuti peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, tidak secara linear berdampak pada pengalaman peserta didik. Indikator pengalaman perundungan siswa justru menunjukkan dinamika naik-turun yang mengindikasikan belum stabilnya implementasi kebijakan. Kondisi ini menguatkan temuan Swearer et al. (2010) bahwa efektivitas kebijakan anti-bullying sangat dipengaruhi oleh konsistensi implementasi, dukungan sumber daya, serta keberlanjutan program di tingkat sekolah. Selain itu, Rigby dan Smith (2011) menegaskan bahwa kebijakan yang bersifat formal tanpa diikuti praktik yang konsisten cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kasus bullying.

Sementara itu, kategori sekolah 3 menunjukkan kondisi yang lebih menantang, dengan capaian awal yang relatif rendah, khususnya pada indikator pengalaman perundungan peserta didik yang mengalami penurunan tajam pada tahun 2023. Namun demikian, terjadi perbaikan yang cukup signifikan pada tahun 2025, terutama pada peningkatan rasa aman siswa. Hal ini mengindikasikan adanya upaya intervensi kebijakan yang mulai menunjukkan dampak positif, meskipun belum sepenuhnya stabil pada aspek pemahaman guru. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan dalam pengalaman belajar peserta didik dapat terjadi meskipun kapasitas guru belum optimal, terutama jika didukung oleh faktor lain seperti kebijakan sekolah, pengawasan, atau intervensi eksternal (Olweus, 2013).

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan anti-bullying di Kota Metro telah berjalan, namun dengan tingkat efektivitas yang berbeda antar kategori sekolah. Sekolah kategori 1 mencerminkan implementasi yang relatif optimal, sementara kategori 2 dan 3 masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal konsistensi dan kapasitas. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan implementasi kebijakan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan.

Lebih lanjut, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan anti-bullying tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi di tingkat satuan pendidikan. Peran guru sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran menjadi faktor yang sangat menentukan, sebagaimana ditunjukkan oleh hubungan antara peningkatan pemahaman guru dengan perbaikan pengalaman peserta didik. Hal ini sejalan dengan penelitian Fadil (2023) yang menyatakan bahwa pelatihan guru dalam penanganan bullying memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan di sekolah.

Dalam konteks Kota Metro, perbaikan yang mulai terlihat pada beberapa indikator, khususnya pada tahun 2025, dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari penguatan implementasi kebijakan, termasuk optimalisasi peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta inovasi pendekatan yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Namun demikian, fluktuasi yang masih terjadi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memerlukan pendekatan yang lebih sistemik, meliputi penguatan kapasitas guru, konsistensi program, serta dukungan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan.



Dengan demikian, untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan secara menyeluruh, diperlukan upaya penguatan implementasi kebijakan anti-bullying yang lebih merata, terstruktur, dan berkelanjutan di seluruh kategori sekolah. Pendekatan ini penting agar kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam praktik dan budaya sekolah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan anti-bullying di Kota Metro secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan arah yang positif. Hal ini tercermin dari adanya struktur kelembagaan yang jelas melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tingkat kota hingga satuan pendidikan, serta didukung oleh regulasi dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Dari sisi implementasi, kebijakan telah dijalankan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan program, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala.

Dari aspek substansi, kebijakan anti-bullying di Kota Metro tidak hanya berfokus pada penanganan kasus (kuratif), tetapi lebih menekankan pendekatan preventif melalui penguatan karakter, integrasi nilai-nilai anti-kekerasan dalam pembelajaran, serta kegiatan ekstrakurikuler. Pendekatan ini menunjukkan adanya komitmen pelaksana kebijakan dalam membangun budaya sekolah yang aman dan kondusif secara berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan implementasi juga didukung oleh kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, seperti LPAI, kepolisian, perguruan tinggi, serta orang tua. Sinergi ini memperkuat aspek edukasi, pencegahan, dan penanganan kasus secara lebih komprehensif. Bahkan, beberapa sekolah telah melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi, seperti pemasangan CCTV, sebagai bentuk adaptasi dalam mendukung pengawasan.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sistem pengawasan, serta pengaruh faktor eksternal seperti media sosial dan kurangnya keterlibatan orang tua. Selain itu, data menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman siswa terhadap bullying belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan kasus perundungan di lapangan. Hal ini menandakan bahwa perubahan perilaku membutuhkan proses yang berkelanjutan dan tidak dapat dicapai secara instan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan anti-bullying di Kota Metro telah berjalan secara terstruktur dan kolaboratif, namun masih memerlukan penguatan agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal dalam menekan kasus bullying di lingkungan sekolah.

Sebagai rekomendasi kebijakan, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas implementasi kebijakan anti-bullying melalui peningkatan sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan tenaga khusus atau unit yang fokus menangani pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, serta menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan terkait deteksi dini, penanganan kasus, dan pendekatan restoratif. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi perlu dikembangkan secara lebih terstruktur dan berbasis data, sehingga setiap perkembangan kasus dapat terpantau secara akurat dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan lanjutan. Penguatan ini juga perlu didukung oleh optimalisasi peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan di satuan pendidikan.

Di sisi lain, penguatan implementasi kebijakan juga perlu diarahkan pada peningkatan peran keluarga dan masyarakat serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Sekolah bersama pemerintah daerah perlu mengembangkan program edukasi bagi orang tua guna meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka dalam mengawasi serta membentuk perilaku anak, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Mengingat pengaruh media sosial yang cukup signifikan dalam memicu konflik antar siswa, diperlukan upaya peningkatan literasi digital melalui integrasi dalam pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, pengembangan program preventif yang inovatif, seperti pembentukan duta anti-bullying, peer



counseling, serta pemanfaatan platform digital untuk pelaporan kasus, dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih responsif dan inklusif. Penguatan kolaborasi lintas sektor dengan lembaga eksternal juga perlu terus ditingkatkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka yang telah memberikan dukungan pendanaan dalam pelaksanaan penelitian ini, sehingga seluruh rangkaian kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan baik hingga tahap penyusunan laporan akhir. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Metro yang telah memberikan izin, dukungan, serta akses data yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada pihak sekolah dasar di Kota Metro yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini, baik kepada kepala sekolah, maupun pihak terkait lainnya yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta berbagi pengalaman secara terbuka dan konstruktif. Partisipasi dan kerja sama dari seluruh pihak tersebut sangat berkontribusi dalam memperkaya data dan memperdalam analisis penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan pendidikan, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan *bullying* di lingkungan sekolah dasar

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, G. (2021). *Stop Bullying A-Z: Problem Bullying dan Solusinya*. Bandung: Cemerlang Publishing.
- Chen, Q., Chan, K. L., Guo, S., Chen, M., Lo, C. K. M., & Ip, P. (2023). *Effectiveness of digital health interventions in reducing bullying and cyberbullying: A meta-analysis*. **Trauma, Violence, & Abuse, 24(3), 1986–2002**. <https://doi.org/10.1177/15248380221082090>
- Creswell, J. W. (2014). *RESEARCH DESIGN: Pendekatan kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Third Edit). Pustaka Pelajar.
- Cross, D., et al. (2011). *Three-year results of the Friendly Schools whole-of-school intervention*. *International Journal of Behavioral Development*.
- Fadil, K. (2023). Peran Guru dalam Penanaman Sikap Anti Bullying Verbal dalam Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 123-133.
- Farrington, D. P., & Ttofi, M. M. (2023). *Effectiveness of Anti-Bullying Policies in Schools: A Global Perspective*. *Journal of Educational Research*, 95(3), 241-256.
- Fixsen, D. L., et al. (2005). *Implementation Research: A Synthesis of the Literature*.
- Gaffney, H., Farrington, D. P., & Ttofi, M. M. (2019). *Examining the effectiveness of school-bullying intervention programs globally*. *International Journal of Bullying Prevention*
- Lee, S., & Hong, J. S. (2023). *School Policies Against Bullying: Cross-Cultural Perspectives*. *International Journal of Bullying Prevention*, 4(1), 11-25.
- Maharani, I., Wakhyudin, H., & Wardana, M. Y. S. (2024). Implementasi Kebijakan Anti Bullying di Sekolah (Studi Kasus SD N 2 Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal). *Literasi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(2), 20496.
- Masdin, M. (2013). Fenomena bullying dalam pendidikan. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 6(2), 73–83.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell.



- Olweus, D. (2013). *School Bullying: Development and Some Important Challenges*. *Annual Review of Clinical Psychology*, 9, 751-780.
- Pontzer, D., Smith, A., & Park, H. (2023). *Bullying and Student Wellbeing in Primary Schools: Emerging Trends*. *Educational Psychology Review*, 35(4), 879-899.
- Rahmawati, I., Siregar, D., & Pratama, Y. (2023). *Implementasi Kebijakan Anti-Bullying di Sekolah Dasar: Studi Kasus Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 15(2), 101-115.
- Rigby, K. (2002). *New Perspectives on Bullying*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Rigby, K., & Smith, P. K. (2011). *Is School Bullying Really on the Rise?*. *Social Psychology of Education*, 14(4), 441-455.
- Salmivalli, C. (2022). *Participant Roles in Bullying: Current Trends and Future Directions*. *Journal of School Psychology*, 93(1), 42-57.
- Saputra, M., Fitriana, D., & Wibisono, R. (2022). *Penguatan Pendidikan Karakter sebagai Upaya Pencegahan Bullying di Sekolah Dasar*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 14(1), 23-37.
- Setiawan, B. (2022). *Evaluasi Kebijakan Anti-Bullying di Sekolah Dasar: Studi di Provinsi Lampung*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 9(3), 45-60.
- Smith, P. K., & Sharp, S. (1994). *School Bullying: Insights and Perspectives*. London: Routledge.
- Smith, P. K., Salmivalli, C., & Cowie, H. (2020). *Effectiveness of School-Based Programs to Reduce Bullying: A Commentary*. *Journal of Experimental Criminology*, 16, 423-441.
- Subarsono, A.G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Surya, A., Hartono, W., & Indriani, T. (2023). *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Anti-Bullying di Sekolah Indonesia*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 18(2), 32-47.
- Swearer, S. M., Espelage, D. L., Vaillancourt, T., & Hymel, S. (2010). *What Can Be Done About School Bullying?*. *Educational Psychologist*, 45(4), 178-188.
- UNESCO. (2020). *School violence and bullying: Global status report*.
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Yusnata, O. (2023). *Strategi Palembang Ekspres (PALPRES) Dalam Konvergensi Media*. *Tabayyun: Journal of Journalism*, 4(1), 54-74.
- (JPPI), J. P. P. I. (2024). *JPPI: Sepanjang Tahun 2024*. [https://www.kompas.com/edu/read/2024/10/24/163509171/jppi-sepanjang-tahun-2024-ada-293-kasus-kekerasan-di-sekolah#google\\_vignette](https://www.kompas.com/edu/read/2024/10/24/163509171/jppi-sepanjang-tahun-2024-ada-293-kasus-kekerasan-di-sekolah#google_vignette)
- KPAI. (2024). *Kasus kekerasan terhadap anak pada satuan pendidikan terus terjadi: KPAI lakukan FGD dengan stakeholder dan sepakati beberapa rekomendasi*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-kekerasan-terhadap-anak-pada-satuan-pendidikan-terus-terjadi-kpai-lakukan-fgd-dengan-stakeholder-dan-sepakati-beberapa-rekomendasi>
- <https://lampung.antaraneews.com/berita/793021/disdikbud-metro-komitmen-cegah-tindak-kekerasan-di-sekolah>
- <https://www.a1bos.com/permudah-laporan-masyarakat-dinas-pendidikan-kota-metro-hadirkan-inovasi-barcode>